

Pertaruhan Identitas di Era AI: Menegaskan Kedaulatan Budaya Indonesia



Yoseph Hendrik Maturbongs
Dosen STARKI

Pendahuluan

Delapan puluh tahun kemerdekaan Indonesia mencatat perjalanan dari perjuangan fisik hingga memasuki era digital yang cepat dan kompleks. Di tengah berbagai pencapaian dalam bidang politik dan ekonomi, satu pertanyaan penting muncul: bagaimana dengan kedaulatan budaya kita ditengah “hingar-bingarnya” perkembangan teknologi?

Di era teknologi saat ini, ketika informasi bergerak dalam hitungan detik dan algoritma menentukan apa yang kita lihat dan dengar, warisan budaya lokal menghadapi tantangan serius. Bahasa daerah yang dahulu menjadi penanda identitas komunitas kini mulai jarang terdengar (Anhar, 2024). Tradisi lisan, cerita rakyat, dan praktik budaya yang tidak terdokumentasi secara digital perlahan menghilang dari ruang publik. Sekali hilang, banyak dari warisan ini sulit, atau bahkan mustahil untuk dikembalikan. Kondisi ini mengancam keberlanjutan komunikasi antar-generasi dan mereduksi kekayaan narasi yang membentuk ruang publik kita. Padahal, budaya lokal bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan sumber nilai, pengetahuan, dan cara pandang yang membentuk jati diri bangsa (Ratih et al., 2025).

Teknologi berkembang pesat. Dari Satelit Palapa sebagai simbol integrasi nasional, kini kita memasuki era kecerdasan artifisial (AI), *big data*, dan digitalisasi budaya. Namun, di balik inovasi itu, muncul paradoks: teknologi yang seharusnya memperkuat identitas justru berpotensi mendorong “amnesia kultural” jika tidak digunakan secara strategis dan berdaulat.

Oleh karena itu, artikel ini berargumen bahwa teknologi, khususnya AI, harus diposisikan bukan sekadar sebagai alat pelestarian pasif, melainkan sebagai mitra strategis untuk menegaskan kembali kedaulatan budaya Indonesia di panggung global. Dengan menjadikan bahasa daerah, dokumentasi visual, dan praktik adat sebagai studi kasus utama, tulisan ini akan menelusuri bagaimana teknologi digital, mulai dari pemrosesan bahasa hingga film dokumenter

dan fotografi komunitas, dapat bertransformasi dari sekadar alat pelestarian menjadi arena untuk menegaskan identitas bangsa. Artikel ini akan dimulai dari refleksi kritis atas proyek teknologi nasional, dilanjutkan dengan analisis paradoks digital, studi kasus inovatif, hingga rekomendasi strategis untuk membangun ekosistem budaya digital yang berdaulat dan inklusif.

Dari Integrasi Fisik ke Identitas Digital

Pada tahun menghubungkan Sabang sampai Merauke, memperkuat rasa kebangsaan melalui siaran yang terpusat dan narasi 1976, Indonesia meluncurkan Satelit Palapa, sebuah langkah monumental yang bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang mimpi besar menyatukan nusantara. Palapa adalah arsitek kedaulatan dari atas (*top-down*); Palapa menjadi jembatan komunikasi yang kolektif. Di masa itu, teknologi menjadi alat pemersatu yang efektif.

Namun, dunia telah berubah. Kini kita hidup dalam ekosistem digital yang terdesentralisasi, di mana informasi menyebar dalam jaringan yang cair (Hein et al., 2020). Platform global dan algoritma telah menciptakan ruang baru, ruang di mana identitas bisa dibentuk, dinegosiasikan, atau bahkan tererosi dalam sekejap. Identitas digital bukan lagi sekadar representasi daring, tetapi telah menjadi medan pertarungan budaya di mana nilai-nilai lokal diuji dalam kompetisi global yang tak seimbang (Pasopati, 2015).

Pemerintah merespons perubahan ini dengan kebijakan strategis seperti *Making Indonesia 4.0* (Astuti & Stiawati, 2023) dan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Komarudin et al., 2024). Visi ini menandai pergeseran dari proyek integrasi fisik ke proyek identitas digital. Namun, ada pergeseran paradigma yang krusial: kebijakan saat ini cenderung memandang budaya sebagai "konten" untuk dikomodifikasi dalam ekonomi kreatif, bukan sebagai "sumber nilai" yang menjadi fondasi kedaulatan bangsa. Dimensi budaya seringkali menjadi catatan kaki, kalah prioritas dari target ekonomi dan industri.

Di sinilah semangat Palapa diuji secara fundamental. Proyek teknologi nasional hari ini tidak lagi cukup hanya dengan membangun infrastruktur, tetapi harus berjuang untuk memastikan bahwa teknologi tersebut mencerminkan keberagaman nilai lokal, bukan sekadar meniru model dominasi global. Ini adalah perjuangan untuk kedaulatan dari bawah (*bottom-up*), yang berakar pada partisipasi komunitas. Sebab, dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, siapa yang menguasai data, ia menguasai narasi. Dan dalam konteks Indonesia, narasi itu haruslah inklusif, beragam, dan berakar pada budaya kita sendiri, sebuah tugas yang jauh lebih kompleks daripada sekadar meluncurkan satelit.

Paradoks Digital

Teknologi digital telah membawa kita ke era akselerasi tanpa henti. Inovasi muncul setiap hari, dan kecerdasan buatan mulai menyentuh berbagai aspek kehidupan. Namun, di balik kemajuan yang dirayakan itu, tersembunyi sebuah paradoks yang mengkhawatirkan: semakin cepat inovasi teknologi bergerak, semakin cepat pula erosi tradisi terjadi.

Contoh paling nyata adalah bahasa daerah. Menurut data Badan Bahasa, lebih dari 400 bahasa daerah di Indonesia masuk kategori "terancam punah" karena minimnya penutur aktif di

kalangan generasi muda (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021; Tondo, 2009). Fenomena ini adalah gejala dari amnesia digital, sebuah kondisi di mana warisan budaya yang tidak terwakili dalam format digital secara perlahan lenyap dari ingatan kolektif. Tradisi lisan, cerita rakyat, dan praktik budaya yang dulu diwariskan dari mulut ke mulut kini kalah bersaing di *platform* digital yang didominasi oleh konten berbahasa global (Maturbongs, 2021).

Masalahnya lebih dalam dari sekadar persaingan konten. Kita sedang menghadapi bentuk baru dominasi yang disebut kolonialisme algoritmik. Sebagian besar sistem AI mulai dari mesin pencari hingga model bahasa, dilatih menggunakan data masif berbahasa Inggris dan merefleksikan nilai-nilai budaya Barat. Akibatnya, sistem ini secara inheren mengalami "kebutaan budaya" terhadap konten lokal yang tidak sesuai dengan format dan metadata mereka. Budaya yang tidak terbaca oleh mesin, secara efektif menjadi budaya yang tidak terlihat dan tidak relevan dalam ekosistem digital.

Kesenjangan akses teknologi di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) memperparah marjinalisasi ini. Komunitas lokal tidak hanya tertinggal secara infrastruktur, tetapi juga kehilangan hak untuk merepresentasikan budayanya sendiri dalam bahasa teknologi, sebuah bentuk perampasan hak digital (*digital disenfranchisement*).

Paradoks ini memaksa kita untuk mengakui sebuah kebenaran yang tidak nyaman, yaitu bahwa tanpa “desain yang sadar” dan intervensi yang berdaulat, teknologi yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan justru akan berfungsi sebagai “Agen Erosi Kultural” yang efisien. Inovasi digital kita terbukti belum inklusif, dan kita lebih sering berperan sebagai konsumen pasif dalam narasi budaya digital global, bukan sebagai pencipta yang setara.

Solusi Teknologis

Jika teknologi dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan budaya, maka teknologi juga dapat menjadi sekutunya, asal dikembangkan dan digunakan dengan kesadaran nilai serta keberpihakan pada keanekaragaman budaya. Di tengah arus digitalisasi yang kian deras, mulai tumbuh berbagai inisiatif yang menjadikan kecerdasan artifisial (AI) bukan hanya alat teknis, melainkan instrumen kebudayaan yang aktif dalam pelestarian warisan budaya.

Salah satu pendekatan yang menonjol adalah pemanfaatan teknologi *Natural Language Processing* (NLP) untuk bahasa daerah (Dar et al., 2023). Beberapa komunitas dan universitas di Indonesia telah mulai mengembangkan korpus digital untuk bahasa lokal seperti Jawa, Sunda, dan Bugis (Raharjo et al., 2022). Korpus ini berisi kumpulan teks, kosakata, hingga struktur tata bahasa yang digunakan untuk melatih model AI agar dapat memahami dan memproses bahasa tersebut. Hasilnya pun nyata: munculnya kamus digital interaktif, *chatbot* dalam bahasa daerah, hingga sistem terjemahan otomatis yang membantu pembelajaran dan pelestarian bahasa lokal secara lebih luas dan menarik.

Selain itu, hadir pula konsep “museum tanpa dinding”, yakni digitalisasi naskah kuno, pemetaan cerita rakyat, dan dokumentasi ritual adat yang kini dapat diakses secara daring (Fauzan, 2022). Museum virtual memungkinkan siapa pun, dari mana pun, untuk menjelajahi warisan budaya yang sebelumnya tersembunyi di ruang fisik atau institusi tertentu. Teknologi membuka pintu inklusivitas, memperluas akses, dan mendemokratisasi pengalaman budaya.

Tak kalah penting, pelestarian budaya juga dilakukan melalui medium visual seperti film dokumenter dan fotografi komunitas. Film *Cerita dari Dalam Tembok Keraton Surakarta Hadiningrat* menjadi contoh bagaimana narasi budaya dapat dihidupkan kembali melalui layar (Wiranegara, 2024). Film ini merekam kehidupan, nilai, dan ritus budaya di dalam keraton secara autentik, menjadikannya arsip visual yang edukatif dan reflektif. Sementara itu, pameran fotografi *The Color of Art* oleh komunitas SK-ART menampilkan 75 karya dari 65 fotografer lokal yang mendokumentasikan ekspresi budaya Indonesia, dari ritual adat hingga seni pertunjukan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pelestarian budaya melalui lensa (Kemenekraf, 2025).

Namun, tidak cukup hanya menciptakan *platform* digital. Kita perlu mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui model berbasis komunitas seperti *crowdsourcing*. Aplikasi digital yang memungkinkan warga untuk mendokumentasikan budaya mereka sendiri, mulai dari resep kuliner tradisional, lagu daerah, hingga praktik adat telah muncul dan menunjukkan arah baru dalam pelestarian budaya. Dalam pendekatan ini, komunitas tidak lagi menjadi objek yang “dilestarikan”, tetapi menjadi subjek aktif yang menentukan cara budaya mereka hadir dan hidup di ruang digital. Teknologi menjadi alat pemberdayaan, bukan dominasi.

Meski begitu, jalan ini bukan tanpa tantangan. Salah satu masalah utama adalah bias algoritmik (Tsamados et al., 2022), di mana AI yang dilatih dengan data yang tidak beragam bisa gagal menangkap kekayaan ekspresi budaya yang tidak umum atau marginal. Dialek lokal, idiom unik, atau bentuk narasi tradisional bisa terpinggirkan jika tidak dilibatkan secara sadar dalam proses pengumpulan dan pelatihan data. Ini menimbulkan pertanyaan besar: budaya siapa yang diwakili oleh algoritma?

Oleh karena itu, selain teknologi, kita juga membutuhkan ekosistem etis dan inklusif. Pengembangan AI sebagai instrumen budaya harus melibatkan para pelaku budaya lokal, peneliti bahasa, lembaga adat, serta komunitas digital untuk bersama-sama membangun sistem yang adil secara kultural. Ini perlu didukung dengan literasi AI berbasis budaya, agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga kontributor kritis yang memahami hak, risiko, dan potensi dari representasi budaya mereka di ranah digital.

Di masa depan, Indonesia berpeluang besar untuk memimpin dunia dalam menciptakan “algoritma berkebudayaan”, yakni sistem AI yang tidak hanya mengenali teks dan struktur bahasa, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, harmoni sosial, dan kearifan lokal. Dengan semangat kolaboratif dan keberpihakan yang tepat, kita tidak hanya melestarikan masa lalu, tetapi juga menciptakan masa depan kebudayaan Indonesia yang hidup, relevan, dan berdaulat di era AI.

Membangun Infrastruktur Sosial Digital

Teknologi, secanggih apa pun, akan menjadi monumen sunyi jika tidak dipahami dan dihidupkan oleh masyarakat. Di sinilah letak peran fundamental dari infrastruktur sosial digital, yang ditopang oleh dua pilar utama: komunikasi publik yang strategis dan literasi digital yang kritis.

Pertama, komunikasi publik berfungsi sebagai jembatan antara inovasi dan adopsi. Kampanye edukatif, konten kreatif, dan siaran media dapat mengubah proyek pelestarian dari sekadar inisiatif elite teknologi menjadi gerakan kolektif. Ketika masyarakat tahu bahwa bahasa daerah mereka bisa diabadikan lewat aplikasi, partisipasi bukan lagi sebuah abstraksi. Namun, partisipasi ini tidak muncul dari ruang hampa; ia harus dirancang dan diperjuangkan secara kolaboratif oleh pemerintah, media, akademisi, dan komunitas adat dalam ekosistem algoritma yang kompleks. Kedua, partisipasi yang bermakna menuntut literasi digital yang kritis. Ini melampaui sekadar kemampuan teknis, menuju kesadaran untuk memahami bagaimana teknologi bekerja, apa dampaknya, dan bagaimana ia bisa digunakan secara berdaulat. Di era AI generatif saat ini, urgensinya semakin besar. Kemampuan untuk menciptakan distorsi budaya secara massal menuntut masyarakat yang tidak hanya bisa mengunggah konten, tetapi juga bisa menyaring, memverifikasi, dan menjaga integritas narasi budayanya.

Literasi kritis juga berarti memahami hak dan tanggung jawab digital. Siapa pemilik data budaya yang kita unggah? Bagaimana memastikan kompensasi yang adil dan mencegah komodifikasi tanpa izin? Pertanyaan-pertanyaan etis ini harus menjadi inti dari pendidikan digital, agar masyarakat bertransformasi dari pengguna pasif menjadi penjaga aktif warisan mereka. Dengan membangun infrastruktur sosial digital yang kokoh, kita dapat memastikan bahwa teknologi menjadi ruang bersama. Di sinilah letak kedaulatan budaya yang sejati, bukan pada kecanggihan basis data, melainkan pada pengetahuan, partisipasi, dan kesadaran kolektif yang menghidupinya.

Dialektika Etika dan Kedaulatan Data

Di balik janji teknologi untuk melestarikan budaya, tersembunyi sebuah dialektika etis yang krusial. Upaya pelestarian digital, jika tidak dilandasi prinsip keadilan, berisiko menjadi arena baru bagi ekstraksi digital dan pelanggaran ketidakadilan historis.

Isu pertama adalah kolonialisme algoritmik. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, sistem AI yang dilatih dengan data dominan secara sistematis meminggirkan keragaman lokal. Aplikasi penerjemah mungkin mengenali “halo”, tetapi abai pada “horas”, “sugeng rawuh”, “wilujeung tepang”, “nara gerotelo” dan lain sebagainya. Ini bukan sekadar cacat teknis, ini adalah bentuk ketimpangan representasi yang dilembagakan oleh kode, sebuah mekanisme yang mereproduksi marjinalisasi dalam skala global. Isu kedua adalah kedaulatan dan kepemilikan data. Ketika sebuah komunitas mengunggah pengetahuannya, siapa yang sesungguhnya memegang kendali? Dalam "hukum rimba digital" saat ini, di mana kerangka hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual komunal masih lemah, data budaya rawan dieksploitasi. Tanpa perlindungan, partisipasi komunitas bisa berujung pada komodifikasi budaya mereka sendiri tanpa izin atau kompensasi yang adil.

Kedua masalah tersebut diperparah oleh kesenjangan kapasitas yang nyata. Bagi komunitas yang tidak memiliki akses atau literasi yang memadai, mereka bahkan tidak bisa ikut serta dalam perdebatan etis ini. Mereka menjadi objek pasif dalam proyek pelestarian, bukan subjek yang berdaulat. Oleh karena itu, pelestarian budaya digital harus dipahami bukan sebagai proyek teknis, melainkan sebagai proyek politis yang berdimensi etis. Diperlukan kebijakan publik afirmatif yang melindungi hak komunitas, menjamin partisipasi yang adil, dan

menanamkan prinsip etika dalam setiap desain teknologi. Tanpa fondasi ini, teknologi bisa menjadi alat yang justru merugikan. Namun, dengan tata kelola yang berpihak dan etika yang tertanam dalam setiap algoritma, kita bisa menjadikan AI bukan hanya cerdas, tetapi juga berhikmat.

Inovasi Inklusif dari Berbagai Penjuru Nusantara (Studi Kasus)

Di tengah bayang-bayang kolonialisme algoritmik dan risiko ekstraksi digital, perlawanan kultural justru lahir dari akar rumput. Berbagai komunitas di Indonesia membuktikan bahwa kedaulatan budaya bukanlah utopia, melainkan proyek nyata yang sedang diperjuangkan melalui inovasi yang partisipatif dan beretika.

- Menjawab Kedaulatan Data di Sulawesi Selatan: Di sini, sekelompok peneliti lokal mengembangkan aplikasi kamus digital bahasa Bugis. Lebih dari sekadar menghimpun kosakata, mereka secara sadar melibatkan komunitas sebagai pemilik data (Syamsuri & Bur, 2023). Ini adalah antitesis dari model ekstraksi digital, di mana data bahasa dan suara penutur asli tetap menjadi milik komunal, bukan aset korporasi.
- Menjaga Integritas Konteks di Yogyakarta: Komunitas seni dan akademisi berkolaborasi mendigitalisasi naskah kuno Jawa. Proyek ini tidak berhenti pada pemindaian, tetapi dilanjutkan dengan transkripsi dan pelabelan semantik yang mendalam (*7000 Halaman Manuscript di Yogyakarta Didigitalisasi*, 2023; *Program WILMA Digitalisasikan 33 Naskah Kuno Di Yogyakarta*, n.d.). Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa AI tidak hanya membaca teks, tetapi juga memahami konteks budaya, sebuah langkah penting untuk menjaga makna asli dan mencegah distorsi.
- Melawan Bias Algoritma di Papua: Di sini, sebuah pendekatan radikal dilakukan untuk bahasa daerah yang minim dokumentasi (Rumansara, 2015). Model AI tidak dilatih dengan data global, melainkan dibangun dari nol bersama penutur asli. Komunitas adat dilibatkan langsung dalam proses *machine learning*. Ini adalah bentuk perlawanan langsung terhadap bias algoritma, memastikan bahwa teknologi tunduk pada budaya, bukan sebaliknya (Dwivedi, 2024; Tsamados et al., 2022).
- Membangun Arsip Partisipatif di Sumatra Barat: Warisan budaya lisan Minangkabau merupakan bentuk pengetahuan tak tertulis yang kaya nilai, namun rentan punah akibat minimnya dokumentasi sistematis dan perubahan pola komunikasi generasi muda. Di tengah tantangan ini, pendekatan metaliterasi muncul sebagai strategi pelestarian yang menjanjikan. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan keterampilan teknis, tetapi juga mendorong kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan etis dalam proses dokumentasi budaya. Melalui integrasi metaliterasi, komunitas Minangkabau mulai bertransformasi dari sekadar pelestari pasif menjadi produsen sekaligus kurator informasi budaya mereka sendiri. Dokumentasi dilakukan secara kolaboratif dan reflektif, memungkinkan ekspresi budaya lisan seperti kaba, pantun, dan pepatah-petitih untuk bertransformasi menjadi sumber informasi yang dapat diakses lintas generasi dan media. Dengan demikian, arsip budaya hidup yang dibangun bukan hanya menjadi koleksi digital, tetapi juga ruang

partisipatif yang memperkuat eksistensi budaya lokal di era digital. (Satria & Zalmi, 2025).

- Menghidupkan Tradisi Lewat Lensa dan Layar. Di tengah arus digital yang kian cepat, pelestarian budaya juga dilakukan melalui medium visual yang kuat dalam bentuk film dokumenter dan fotografi komunitas. Film *Cerita dari Dalam Tembok Keraton Surakarta Hadiningrat* menjadi contoh bagaimana narasi budaya dapat dihidupkan kembali melalui layar (Wiranegara, 2024). Film ini merekam kehidupan, nilai, dan ritus budaya di dalam keraton secara autentik, menjadikannya arsip visual yang edukatif dan reflektif. Disisi lain, bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian budaya melalui lensa terlihat dalam pameran fotografi *The Color of Art* oleh komunitas SK-ART yang menampilkan 75 karya dari 65 fotografer lokal (Kemenekrif, 2025). Pameran ini mendokumentasikan ekspresi budaya Indonesia, dari ritual adat, seni pertunjukan, hingga kehidupan sehari-hari. Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak harus selalu berbasis teks atau arsip formal. Visualisasi budaya melalui film dan foto membuka ruang baru bagi generasi muda untuk mengenali, memahami, dan merayakan identitas mereka secara kreatif dan inklusif.

Dari contoh-contoh studi kasus yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa inovasi yang paling berdampak tidak selalu yang paling canggih secara teknis, tetapi yang paling berakar secara etis. Idealnya inovasi tumbuh dari komunitas, bukan dipaksakan dari atas. Hal yang terpenting yang harus selalu dipertahankan adalah bahwa inovasi digital menempatkan para pemilik budaya bukan sebagai objek pelestarian, melainkan sebagai subjek yang berdaulat atas narasi digital mereka sendiri.

Rekomendasi Strategis

Pelestarian budaya tidak bisa lagi dilakukan secara sporadis. Untuk memastikan warisan kita tetap hidup dan relevan, kita perlu merancang sebuah ekosistem budaya digital yang terstruktur. Ekosistem ini berdiri di atas “Model Tiga Pilar Kedaulatan Digital”, sebuah jejaring sinergis yang menghubungkan negara, inovator teknologi, dan komunitas sebagai pemilik sah budaya.

Pilar pertama adalah negara sebagai orkestrator dan pelindung. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan fondasi kebijakan yang berpihak. Peran ini mencakup:

- Regulasi Afirmatif dilakukan dengan cara menerbitkan kebijakan yang secara eksplisit mendanai riset dan pengembangan teknologi pelestarian budaya, serta memberikan insentif bagi *startup* dan UMKM kreatif di bidang ini.
- Perlindungan hukum dilaksanakan dengan merumuskan dan menegakkan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual komunal, mencegah praktik ekstraksi digital oleh pihak asing maupun domestik.
- Pemerataan akses adalah suatu cara untuk memastikan bahwa infrastruktur digital menjangkau wilayah 3T, sehingga tidak ada komunitas yang tertinggal dalam partisipasi budaya digital.

Pilar kedua adalah akademisi dan industri sebagai inovator yang bertanggung-jawab. Lembaga riset dan pelaku industri teknologi adalah mesin inovasi, namun inovasi tersebut harus dilandasi etika. Peran mereka meliputi:

- Mengembangkan teknologi terbuka (*Open-Source*) melalui penciptaan perangkat lunak dan *platform* yang mudah diakses, dimodifikasi, dan digunakan oleh komunitas tanpa beban lisensi yang mahal.
- Membangun kapasitas lokal dengan cara menyediakan pendampingan dan pelatihan teknis yang berkelanjutan, dari digitalisasi dasar hingga manajemen data budaya yang kompleks.
- Mendorong riset lintas disiplin, misalnya dengan menggabungkan ilmu komputer dengan antropologi, linguistik, dan hukum untuk menghasilkan solusi teknologi yang sensitif terhadap konteks budaya.

Pilar ketiga adalah komunitas budaya sebagai subjek berdaulat. Komunitas adalah jantung dari ekosistem ini. Mereka bukan objek pelestarian, melainkan subjek yang memegang kendali penuh. Prinsip ini diwujudkan dengan:

- Persetujuan berbasis informasi di awal (*free, prior, and informed consent*) harus dijadikan sebagai bentuk partisipasi dan persetujuan sadar dari komunitas dan harus menjadi syarat mutlak dalam setiap proyek digitalisasi.
- Kedaulatan atas data dan narasi menjadi suatu bentuk kepastian bahwa komunitas memiliki hak penuh untuk mengelola, mengakses, dan menentukan bagaimana representasi digital budaya mereka digunakan.
- Pemberdayaan berbasis kearifan lokal yaitu dengan melakukan transfer teknologi dengan pendekatan yang menghormati nilai, struktur sosial, dan cara pandang komunitas itu sendiri.

Dengan menegakkan ketiga pilar ini secara bersamaan, kita tidak hanya menyelamatkan budaya dari kepunahan, tetapi juga membangun masa depan di mana teknologi menjadi alat emansipasi, bukan dominasi.

Penutup

Delapan puluh tahun kemerdekaan Indonesia adalah momentum untuk melampaui sekadar perayaan historis dan menatap masa depan dengan kesadaran penuh akan siapa kita sebagai bangsa. Di era digital, identitas tidak lagi hanya dibentuk oleh sejarah dan bahasa, tetapi juga oleh teknologi yang kita gunakan, data yang kita hasilkan, dan narasi visual yang kita bangun bersama, baik melalui teks, suara, gambar, maupun layar film.

Generasi digital Indonesia hidup di tengah derasnya arus informasi global. Mereka tumbuh bersama algoritma, belajar dari mesin pencari, dan berinteraksi melalui *platform* visual. Namun, di tengah semua itu, muncul pertanyaan fundamental: apakah mereka masih mengenali bahasa nenek moyang, memahami cerita rakyat kampung halaman, atau merasakan makna dari ritual dan ekspresi budaya yang diwariskan secara turun-temurun?

Artikel ini telah menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi ruang baru bagi budaya untuk hidup dan beregenerasi. Namun, agar ruang itu sungguh menjadi milik kita bangsa

Indonesia, kedaulatan budaya harus ditegaskan secara aktif dalam setiap desain sistem, dalam setiap kebijakan data, dalam setiap unggahan foto, rekaman suara, ataupun produksi film dokumenter. Setiap baris kode, setiap bingkai gambar, dan setiap narasi yang kita dokumentasikan adalah tindakan politis, sebuah penegasan identitas.

Membangun ekosistem budaya digital yang inklusif dan etis bukan lagi sekadar tugas teknis, melainkan sebuah panggilan kebangsaan yang mendesak. Kita tidak hanya melestarikan masa lalu, tetapi juga menciptakan masa depan budaya yang hidup, relevan, dan berdaulat.

Pada akhirnya, kita akan menitipkan kedaulatan budaya pada generasi digital, bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai arsitek narasi, penjaga warisan, dan penegas identitas budaya Indonesia di panggung dunia. Semoga!

Indonesia Emas 2045: Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan. Merdeka!//AW.

Daftar Referensi

- 7000 Halaman Manuscript di Yogyakarta Didigitalisasi. (2023, Agustus | 00.00 WIB). Tempo. <https://www.tempo.co/info-tempo/7000-halaman-manuscript-di-yogyakarta-didigitalisasi-104209>
- Anhar. (2024). Krisis Identitas Budaya Generasi Z: Antara Lema Bahasa Nasional, Bahasa Daerah dan Bahasa Alay. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 58–68.
- Astuti, I. I., & Stiawati, T. (2023). Kebijakan Making Indonesia 4.0 Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Kompeten. *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.37598/jimma.v13i2.1864>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021, February 23). *Bahasa Ibu Terancam Punah, Generasi Muda Jangan Sampai Lengah* | Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa—Kemendikdasmen [Berita]. Badan Bahasa. http://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/berita-detail/3125/bahasa-ibu-terancam-punah-generasi-muda-jangan-sampai-lengah?utm_source=chatgpt.com
- Dar, M. H., Hasibuan, M. N. S., & Nasution, F. A. (2023). Penerapan Natural Language Processing dalam Pembuatan Aplikasi Penerjemah Bahasa Melayu Dialek Panai – Bahasa Indonesia. *Informatika: Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Labuhanbatu.*, 11(3), 177–186.
- Dwivedi, D. (2024). Algorithmic Bias: A Challenge for Ethical Artificial Intelligence (AI). In G. S. Heggde, S. K. Patra, & R. Panda (Eds.), *Immersive Technology and Experiences: Implications for Business and Society* (pp. 67–84). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-99-8834-1_5
- Fauzan, M. (2022). *Pengaruh Virtual Museum Terhadap Minat Berkunjung Pada Museum Multatuli Rangkasbitung* [B.S. thesis, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59520>
- Hein, A., Schrieck, M., Riasanow, T., Setzke, D. S., Wiesche, M., Böhm, M., & Krcmar, H. (2020). Digital platform ecosystems. *Electronic Markets*, 30(1), 87–98. <https://doi.org/10.1007/s12525-019-00377-4>

- Kemenekraf, B. R. (2025, July 20). *Kementerian Apresiasi Pameran Foto SK-ART & Friends Tampilkan Budaya Indonesia*. Ekraf Kemenekraf. <https://ekraf.go.id/news/kementerian-apresiasi-pameran-foto-sk-art-friends-tampilkan-budaya-indonesia>
- Komarudin, D., Candra, E., & Nurdin, I. (2024). Dinamika Kebijakan Publik dan Inovasi Kecerdasan Buatan di Indonesia Tahun 2020-2024. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.758>
- Maturbongs, Y. H. (2021). Kecakapan Digital sebagai Fondasi Keahlian di Masa Pandemi. *TarFomedia*, 2(1), 11–16.
- Pasopati, R. U. (2015). Interaksi Bahasa Identitas Digital dan Nasionalisme Di Era Kontemporer. *Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)*, 6, S-117-S-124. <https://media.neliti.com/media/publications/170543-ID-interaksi-bahasa-identitas-digital-dan-n.pdf>
- Program WILMA Digitalisasikan 33 Naskah Kuno di Yogyakarta*. (n.d.). Retrieved August 7, 2025, from https://www.kabarjogja.id/2023/05/program-wilma-digitalisasikan-33-naskah.html?utm_source=chatgpt.com
- Raharjo, S., Utami, E., Yusa, M., & Sutanta, E. (2022). Systematic Literature Review: Corpus Linguistics in Indonesia. In C. Stephanidis, M. Antona, & S. Ntoa (Eds.), *HCI International 2022 Posters* (pp. 370–377). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06417-3_50
- Ratih, D., Sondarika, W., Suryana, A., Ramdani, D., & Melindawati, M. (2025). Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya: Memperkuat Jati Diri dan Ketahanan Budaya Lokal Melalui e-book Sejarah Untuk Siswa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 31(1), 19–42. <https://doi.org/10.22146/jkn.101999>
- Rumansara, E. H. (2015). Memahami Kebudayaan Lokal Papua: Suatu Pendekatan Pembangunan yang Manusiawi di Tanah Papua. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 1(1), 279323.
- Satria, R. Y., & Zalmi, F. N. H. Z. (2025). Transformasi Pengetahuan Tak Tertulis: Pendekatan Metaliterasi Dalam Dokumentasi Warisan Budaya Lisan Minangkabau. *Jurnal Al-Ma'arif: Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam*, 5(1), Article 1.
- Syamsuri, A. S., & Bur, E. Y. (2023). Perkembangan Ragam Bahasa Prokem Bugis Makassar. *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia, 2023*, 14–24.
- Tondo, F. H. (2009). *Kepunahan Bahasa-Bahasa Daerah: Faktor Penyebab dan Implikasi Etnolinguistik*. 11(2).
- Tsamados, A., Aggarwal, N., Cowls, J., Morley, J., Roberts, H., Taddeo, M., & Floridi, L. (2022). The ethics of algorithms: Key problems and solutions. *AI & SOCIETY*, 37(1), 215–230. <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01154-8>
- Wiranegara, I. (2024). Peran Film Dokumenter “Cerita dari Dalam Tembok Keraton Surakarta Hadiningrat” untuk Mempertahankan Warisan Budaya. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 6(2), 89–102. <https://doi.org/10.25008/jpi.v6i2.156>